



Judul : Panja RUU PKS Cegah Ulangi Kesalahan
Tanggal : Selasa, 30 Maret 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Panja RUU PKS Cegah Ulangi Kesalahan

PANITIA kerja (panja) DPR RI untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) berkomitmen tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ketua Panja Willy Aditya mengatakan kali ini panja akan meminta dan menyerap aspirasi secara komprehensif dari berbagai pihak.

Menurut Willy, sikap pro dan kontra dalam memandang RUU tersebut harus didengarkan yang kemudian suaranya menjadi masukan penting dalam penyusunan RUU tersebut.

“Kalau dulu pro dan kontra ini sangat tajam, jadi hanya mendengar dari salah satu

pihak,” ujarnya saat dihubungi, kemarin, se usai rapat panja dengan Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Dalam rapat tersebut, lanjut Willy, panja menerima masukan yang sangat penting dan bersifat darurat. Masukan dari Komnas Perempuan menjadi elemen penting dalam proses penyusunan RUU PKS untuk segera disahkan.

Rapat yang digelar sekitar 2 jam tersebut telah memberikan hal baru kepada panja. “Tadi mereka berikan hal baru tentang kekerasan seksual dalam konteks siber karena kita di era digital apalagi di tengah pandemi, banyak aktivitas

melalui internet dan virtual ini menjadi perhatian,” papar Willy.

Adapun terkait dengan zina, perkosaan, dan hubungan sejenis turut menjadi poin krusial yang memang hingga kini belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Itu yang akan kami dalam, juga masukan dari teman-teman yang ajukan uji materi ke MK (Mahkamah Konstitusi), tentu kelompok yang berkeberatan, kami ingin dengar dari mereka apa poin keberatannya. Apakah masalah persepsi atau substansi,” ungkap Willy.

Anggota Panja Fraksi PAN

Guspardi Gaus meminta Komnas Perempuan melakukan pengayaan dalam proses penyusunan RUU PKS. Masukan Komnas juga untuk mencegah tumpang-tindih dengan undang-undang lainnya.

Dalam rapat, Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah mengatakan tindak pidana kekerasan seksual yang menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik meningkat signifikan dalam setahun terakhir. Ketentuan khusus tentang itu sangat penting diakomodasi. “Dalam naskah akademis RUU PKS pada 2017 belum ada, karena itu kami dorong dimasukkan dalam draf RUU ini,” tuturnya. (Sru/P-2)